

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN LINGGA
NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG *AFFIRMATIVE ACTION*
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU LAUT DI
DESA TANJUNGKELIT KABUPATEN LINGGA**

Oleh
**PUTRI FEBRIYANTI
NIM.190563201141**

ABSTRAK

Penetapan *Affirmative Action* ini dibentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Lingga Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut Di Kabupaten Lingga. Peraturan ini bertujuan untuk pelatihan keterampilan dan peningkatan wawasan, dalam meningkatkan taraf hidup, ekonomi, sosial bagi masyarakat suku laut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada saat pengimplementasian Peraturan Bupati. Adapun penelitian ini berlokasi di Desa Tanjungkelit Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga dengan informan sebanyak 8 orang. Metode penelitian in menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Adapun indikator dalam penelitian ini yaitu standar dan sesaran kebijakan, sumber daya karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan kondisi sosial dsn ekonomi. Hasil penelitian ini dari implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dapat disimpulkan bahwa (1) standar dan sasaran dalam penerapan kebijakan *Affirmative Action* telah mengikuti SOP. (2) Jenis program sesuai dengan kondisi, namun belum berjalan dengan optimal, karena tidak semua masyarakat suku laut yang mau mengikuti program tersebut. (3) Sumberdaya yang dilihat dari sasaran yaitu masyarakat suku laut tidak maksimal karena kurangnya kemauan masyarakat suku laut dalam menerima kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Lingga. (4) Karakteristik agen pelaksana telah berjalan dengan baik. (5) Lingkungan ekonomi, dan sosial didapatkan hasil belum memiliki pengaruh terhadap ekonomi masyarakat suku laut karena belum adanya program yang dikusai masyarakat suku laut sehingga belum mampu merubah pola masyarakat suku laut. Oleh karena itu disarankan pemerintah Kabupaten Lingga khususnya pemerintah Desa Tanjungkelit melakukan pemantauan, evaluasi kebijakan yang berjalan, melakukan peningkatan komunikasi dan melakukan trobosan-trobosan baru sehingga kebijakan *Affirmative Action* dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: Impelemntasi, Pemberdayaan, Masyarakat Suku Laut

IMPLEMENTATION OF THE REGENT OF LINGGA DISTRICT REGULATION NUMBER 44 OF 2021 CONCERNING AFFIRMATIVE ACTION IN EMPOWERING SEA TRIBE COMMUNITIES IN TANJUNGKELIT VILLAGE, LINGGA DISTRICT

By
PUTRI FEBRIYANTI
NIM. 190563201141

ABSTRACT

This Affirmative Action determination was formed based on Lingga Regent Regulation Number 44 of 2021 concerning Empowering Sea Tribe Communities in Lingga Regency. This regulation is aimed at skills training and knowledge insight, in improving the standard of living, economy, social for the sea tribe community. This study aims to answer the phenomena that occurred during the implementation of the Regent Regulation. This research is located in Tanjungkelit Village, Bakung Serumpun District, Lingga District with 8 informants. The research method uses a descriptive method with a qualitative approach, using the theory of Donald Van Metter and Carl Van Horn. The indicators in this study are policy standards and objectives, resource characteristics of implementing agents, attitudes/tendencies of implementers, inter-organizational communication, and social and economic conditions. The results of this study from the implementation of policies made by the government, it can be concluded that (1) the standards and targets in implementing Affirmative Action policies have followed the SOP. (2) The type of program is in accordance with the conditions, but it has not run optimally, because not all marine tribes are willing to take part in the program. (3) The resources seen from the target, namely the Laut Tribe community, are not optimal because of the lack of willingness of the Laut Tribe community to accept the policies made by the Lingga Regency government. (4) The characteristics of implementing agents have been going well. (5) The economic environment and the social results obtained have not yet had an impact on the economy of the Laut tribe community because there is no program that the Laut tribe has mastered so that it has not been able to change the pattern of the Laut tribe community. Therefore, it is suggested that the Lingga Regency government, especially the Tanjungkelit Village government, conduct monitoring, evaluate ongoing policies, improve communication and make new breakthroughs so that the Affirmative Action policy can run optimally.

Keywords: Implementation, Empowerment, Sea Tribe Society